

SISTEM MULTIPARTAI DALAM PANDANGAN HASAN AL-BANNA

Aklima

*Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang konsep multipartai dalam pandangan Hasan al-Banna. Multipartai merupakan sistem kepartaian dimana dalam satu negara terdapat banyak partai politik. Sistem ini lahir dari aspek masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, politik, suku, ras, agama dan status, untuk mencari saluran loyalitas pada sebuah organisasi. Tujuan dari kajian ini yaitu Untuk menganalisis konsep pemikiran al-Banna tentang ruang lingkup, kriteria dan sifat dari multipartai. Kajian ini menggunakan metode interpretatif, dengan pendekatan history berdasarkan telaah buku dari al-Banna terhadap gagasan sistem multipartai. Temuan atas kajian ini menunjukkan bahwa, pandangan al-Banna terhadap sistem multipartai disikapi dengan dua konsep, diantaranya: (1) kehadiran sistem multipartai bernilai positif sebagai wujud dakwah untuk kemaslahatan bersama. (2) dinilai negatif dalam pemahaman kesesuaian sistem dengan kondisi politik wilayah. Al-Banna menyetujui adanya sistem multipartai pada negara-negara yang sudah nyata kemerdekaannya sebagai wujud untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara keseluruhan.

Kata kunci; partai politik dan sistem multipartai.

A. Pendahuluan

Sistem multipartai merupakan sistem yang digunakan masyarakat majemuk untuk mencari saluran loyalitas pada organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya. Sistem ini memberi hak untuk menentukan dan menerima berbagai pendapat dalam kelompok tertentu, dan sistem ini dijalankan dinegara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Demokrasi merupakan salah satu sistem yang dijadikan sebagai salah satu cita-cita politik umat islam yang menjamin kebebasan sekaligus memelihara keamanan dari kesewenang-wenangan penguasa. Kebebasan dijadikan sebagai sarana untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari setiap kelompok-kelompok atau partai politik. Oleh karena itu, didalam perpolitikan islam juga didapati kelompok-kelompok atau partai-partai tertentu yang sama-sama memperjuangkan islam (Partai Islam). Kehadiran partai islam menjadi salah satu wujud keberagaman secara identitas politik.

Hasan al-Banna merupakan salah satu tokoh islam yang mengagaskan partai politik yang berlandaskan islam. Al-Banna menegaskan bahwa kehadiran multipartai merupakan suatu alat yang transparansi untuk menyalurkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Sehingga tidak ada kesenjangan strata politik antara masyarakat mayoritas dan minoritas. Disini, al-Banna juga menegaskan bahwa sistem multipartai hanya diberlakukan pada negara yang sudah merdeka. Al-

Banna menambahkan bahwa tidak ada kepertaian dalam islam yang dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dikalangan umat islam, apabila negara tersebut sudah menemukan jati diri secara sempurna. Al- Banna tidak membenarkan pemberlakuan sistem multipartai pada negara-negara dalam masa transisi kemerdekaan.

Tulisan ini akan memaparkan sistem multipartai dalam politik islam dan gagasan politik Hasan al-Banna terhadap sistem multipartai.

B. Pengertian sistem politik

Sistem multipartai yaitu sistem kepertaian (al-hizbiyah) dimana dalam satu negara terdapat banyak partai, prinsip sistem multipartai, hanya partai politik yang berhak menjalankan peranan sebagai *agregator* kepentingan rakyat (Bambang Cipti,2001;10). Secara sederhana sistem multipartai (*multipartysistem, multipartism, polypartism*) terwujud manakala mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyat dibentuk atas dasar kerjasama dua kekuatan atau lebih, dan eksekutif yang tidak homogen. Mayoritas mutlak demikian tidak terwujud tanpa adanya kerjasama, koalisi, dan aliansi (Rusadi Kantaprawija,2006;123).

Sartori (2007) menegaskan bahwa hal terpenting dari sisem kepertaian adalah sebuah peraturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi kekuasaan pemerintahan.

C. Gagasan Hasan al-Banna tentang multipartai

Masa lalu partai islam dinilai sebagai wujud dari aspirasi umat islam. Dimana, pemimpin dan aktivis politik memiliki dua ciri, diantaranya; Pertama, politik non integratif atau partisipan, yaitu politik partisipan yang berkaitan secara langsung dengan pengelompokkan politik islam sebagai kekuatan politik. Misalkan, partai yang dimonopoli oleh partai-partai islam. Kedua, perlemen sebagai sebagai lapangan bermain dan arena perjuangan (Azyumardi,...;35). Konsep ini merupakan upaya untuk memepertegas bahwa islam merupakan ideologi negara.

Al-banna merupakan salah satu tokoh islam yang mencoba mempersatukan antara politik dan agama. Hal dasar yang harus dipahami oleh kalangan umat islam yaitu memahami islam secara komprehensi dari sisi Al-quran dan Sunnah. Kedua ini menjadi pijakan untuk mengatur seluruh rutinitas secara individual dan lingkungan sosial. Menurut Hasan al-Banna, konsep islam sejati yaitu menuntut umat muslim untuk tidak hanya menyibukkan diri dengan urusan aqidah saja sehingga menduakan nilai-nilai syariah. Disini al-Banna dengan tegaskan menjelaskan bahwa umat muslim bersaudara antara satu dan lainnya dan permasalahan muslim lain menjadi kewajiban bersama. Sehingga pemahaman politik dalam konsep al-Banna tidak dinilai satu sisi yaitu

kekuasaan. Akan tetapi, politik merupakan strategi untuk mewujudkan keselarasan dalam beragama. Setiap muslim diwajibkan untuk peduli terhadap permasalahan muslim lainnya baik yang bersifat “privat” atau khalayak umum.

Dibidang politik secara spesifik al-Banna menegaskan bahwa jika ada yang menyatakan bahwa agama tidak berkaitan dengan politik atau politik bukan bagian dari sasaran agama, dan ini dinilai sudah menzalimi diri sendiri juga menzalimi keilmuannya terhadap islam (Ali rahman, 1995;136). Uraian ini dengan tegas ditanggapi al Banna dengan mengeluarkan statement pada sebuah konferensi pelajar ikhwanul Muslimin 1357 H yaitu;

“ seorang muslim tidak akan sempurna agamanya kecuali jika ia menjadi politikus, memiliki pandangan yang jauh tentang problematika umatnya, memperhatikan urusan-urusan mereka dan bersedia untuk membantu mencari jalan keluarnya.” (Muhammad Abdul Qadir,...;28).

Berdasarkan uraian ini al-Banna mengatakan bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan, agama dan politik merupakan suatu pijakan yang menjadi landasan pemikiran al-Banna dalam dakwahnya, sehingga Al-Ikhwanul Muslimin tidak bisa menerima Partai Politik, para elite politik, dan kepartaian dalam skenario politik Mesir, apabila partai politik dikendalikan oleh ideologi dan kepentingan pribadi, tidak ada program dan tujuan yang jelas, aktivitas dikelola oleh individual-individual bukan didasari gagasan. Pada hakikatnya partai politik dijadikan front kapitalisme, alat politik yang dipergunakan oleh kaum kapitalis untuk mengekploitasi para buruh dan menyalahgunakan undang-undang dan aparatur (pegawai) administrasi negara untuk melayani tujuang secara personal dengan mempengaruhi masyarakat bukan atas dasar kepentingan bangsa (Al-Ghazali,...;159).

Kekhawatiran ini dijadikan al-Banna untuk melahirkan beberapa kriteria sistem multipartai dalam islam, diantaranya;

1. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
2. Menjaga kemaslahatan ummat
3. Ukhuwah islamiah
4. Tetap berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan hadist (M Abdul Qadir,...;29).

Penekanan kriteria ini didasari pada kemaslahatan ummat. Dimana partai politik dalam islam harus menjadi Al-quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam praktik politik ini. Hal ini untuk mengaktisipasi kemerosotan politik. Sebagaimana secara umum bahwa kehadiran multipartai dapat mengaburkan stabilitas politik. Namun disisi multipartai menjadi sarana untuk membuka peluang bagi golongan minoritas.

Dimasa al-Banna hidup sistem multipartai yang ada dimesir saat itu masih jauh dari kriteria multipartai. Dimana partai politik didirikan secara khusus atas dorongan ambisi pribadi tidak didasari kemaslahatan umum, akan tetapi bagaimana mendapatkan kedudukan dan kekuasaan.

Menurut Al-Banna dalam sistem negara islam keberadaan partai islam sangat signifikan. Dimana kinerja partai melakukan sosialisasi kepartaiannya melalui dakwah

keseluruh wilayah. Mengingat, bahwa aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pagar pengaman bagi penguasa agar tidak melenceng dari hukum-hukum islam dan hal itu merupakan perkara yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin. Oleh demikian, bahwa kehadiran partai politik tidak didasari pada ijin dari pemerintah setempat. Dimana peran partai politik dalam konteks pemikiran al-Banna tidak hanya menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, akan tetapi peran partai politik sebagai saling mengingatkan sesama pemerintah untuk selalu menjaga kemaslahatan bersama.

Allah berfirman yang artinya;

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (QS.3:104).

Dalam tafsir Al Manaar, Syaikh Muhammad Abduh menafsirkan bahwa kata *Ummat* pada ayat ini bukanlah umat islam atau kaum muslimin secara umum, tapi justru menunjuk pada makna khusus (*jamaa'atun khasshah*) yang memiliki satu ikatan tertentu. Sedangkan Abdul Qadim Zallum dalam kita Ta'rif menafsirkan bahwa kata *Ummat* diartikan sebagai partai politik (*Hizbus siyasi*) dan sifat-sifat partai politik ini dikategorikan dalam, yaitu; (1) menyerukan kepada *al khair*, yaitu islam; (2) menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, yaitu perkara-perkara yang ternilai kebaikannya dan diakui eksistensinya oleh islam; (3) mencegah pada yang mungkar, yaitu perkara-perkara yang diingkari keberadaannya oleh islam dan dikategorikan haram hukumnya oleh syari'at islam (Farid Nu'am, 2004;103-104).

Dari sifat-sifat partai politik ini dapat digunakan untuk menganalisis sistem multipartai yang dijalankan dalam sistem politik indonesia pasca reformasi, dengan lahirnya beragam kelompok masyarakat yang berideologikan islam, nasional dan komunis. Kehadiran partai-partai politik ini seyogya nya menjadi acuan baru bagi tranformasi politik ini. Dimana kehadirannya diperkirakan berkemungkinan sebagai katup pengaman dari kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu yang berkuasa dan meminimalisir penindasan terhadap manusia. Misal; analisis sistem pemerintahan orde baru. Dimana kediktatoran pemerintah menjadikan masyarakat sipil terpinggirkan tanpa ada kebebasan berpikir dan bertindak.

Ditinjau dari sisi lain, multipartai merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat yang sesuai dengan landasan hukum sebuah negara. Sistem multipartai dijalankan di negara yang menjalankan sistem demokrasi salah satunya indonesia. Menurut konsep pemikiran al-Banna dibenarkan menganut sistem multipartai. Hal ini didukung oleh kemerdekaan dan dinilai telah menemukan jati diri bangsa indoneasia. Hal ini berbeda dengan situasi politik Mesir dimasanya dengan kondisi baru dibebaskan dari pengaruh Inggris. Keberadaan partai politik dengan sistem multipartai berkiblat ke Inggris.

Al-Banna menerangkan beberapa indikator kelemahan sistem multipartai di Mesir, diantaranya; (1) ideologi partai politik pada masanya tidak dilandasi pada pemahaman alquran

dan sunnah, kinerja partai dengan tujuan kekuasaan dan telah memecah belahkan sesama ummat islam hanya dengan perbedaan kepentingan dari setiap kelompok. (2) sistem parlementer dengan kehadiran satu atau dua partai yang berada dibawah kontrol penguasaa menjadi solusi terhadap kondisi negara Mesir yang dinilai baru merdeka dari pengaruh Inggris.

D. Analisis dan kesimpulan

Agama dan politik tidak dapat dipisahkan, ini menjadi landasan dari pemikiran al-Banna. Sehingga dikenal dengan slogan *"tidak sempurna iman seseorang jika ia belum menjadi politikus"*. Konsep yang ditawarkan al-Banna yaitu untuk menjalankan sistem pemerintahan dari segi tatanan pemerintahan juga koalisi kepartaian harus diikuti dengan konsep agama.

Al-banna menerangkan beberapa kriteria-kriteria dalam konsep sistem multipartai. Hal ini berbeda dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia dengan keragaman suku, ras dan agama. Meskipun secara konseptual Indonesia merupakan salah satu wilayah yang menjalankan sistem pemilihan dengan sistem multipartai. Akan tetapi sifat dan kriteria partai politik yang ada di Indonesia berbeda dengan sudut pandang al-Banna. Dimana ideologi Partai politik di Indonesia dikategorikan dalam tiga bagian yaitu partai politik yang berideologikan islam (Partai Islam), berideologikan nasional (Parnas), komunis dan muatan lokal (Partai Lokal). Dan ini didasari pada nilai pluralisme dengan lima agama kepercayaan yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Katolik. Sedangkan Mesir dinobatkan sebagai negara islam. Dimana mayoritas penduduknya beragama islam dan al Banna Ikhwanul Musliminnya mencoba mengagaskan Mesir untuk menerapkan *daulah islamiah*.

Al-Banna menerapkan beberapa kriteria-kriteria yang harus diikuti dalam sistem multipartai dalam negara islam; amar ma'ruf nahi mungkar, kemaslahatan umat, ukhuwah islamiah, dan tetap berpegang teguh pada al-quran dan hadist. Sehingga tidak terjadi polemik yang berlandaskan pada visi dan misi semata untuk kepentingan individu dan kelompok.

Disini dapat dianalisis bahwa pandangan al-Banna terhadap sistem multipartai disikapi dengan dua konsep, diantaranya: (1) kehadiran sistem multipartai bernilai positif sebagai wujud dakwah untuk kemaslahatan bersama. (2) dinilai negatif dalam pemahaman kesesuaian sistem dengan kondisi politik wilayah. Al- Banna menyetujui adanya sistem multipartai pada negara-negara yang sudah nyata kemerdekaannya sebagai wujud untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara keseluruhan. Dan ini berbeda dengan Mesir dimasanya pemberlakuan sistem multipartai membawa kekacauan sesama umat beragama dan melahrikan dekadensi moral. Sehingga untuk menuntaskan permasalahan Mesir, al-Banna menawarkan sistem parlementer.

Penegasan al-Banna terhadap partai politik islam menjawab permasalahan politik kekinian di Indonesia tidak bersifat solutif, kehadiran partai islam dinilai hanya berideologikan islam. Akan tetapi, secara praktek dan perilaku organisasi ini sebagian besar menentang islam dengan pedoman Al-quran dan Sunnah. Seyogya partai politik apapun ideologinya tujuannya

dan fungsinya sebagai lembaga yang menjadi penyambung antara masyarakat dan pemerintah. Bukan sebaliknya berlomba-lomba membangun partai baru untuk menghipnotis masyarakat untuk larut dalam kepentingan kelompok-kelompok penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Al Ghazali, *Peta Pemikiran Hasal Al Banna*, Cet,1, 2001. Solo:Era Intermedia.
- Aga Sekamdo, *Membumikan Ikhwanul Muslimin*, Cet,1, 2004. Solo; Wra Intemerdia.
- Ahmed Vaedi, *Agama Dan Politik*, 2006. Jakarta; Citra.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*,Cet, 1, 1999. Solo; Era Intemedia.
- Farid Nu'man, *Al-Ikhwān Al-Muslimun Anugerah Allah Yang Terdalimi*, Cet,II, 2004. Depok; Pustaka Nauka.
- Hasan Al-Banna, *Majmuah Ar-Risalah(Terj, Abu Ridho) Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, 2006. Solo; Era Intermedia.
- Hasan Al-Banna, *Majmuah Ar-Risalah(Terj, Abu Ridho) Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin II*, 2006. Solo; Era Intermedia
- Horowitz, D. 2014. Ethnic Power Sharing: Three Big Problems. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 1-22
- [Http/Www Wikimedia/](http://www.wikimedia.org) Artikel Sistem Multipartai Dan Presidential.
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Murziqin, R. 2013a. Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. 2013b. The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. 2014. Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Ng Philipus, *Sosiologi Dan Politik*.Cet I, 2004. Jakarta; Pt.Raja Grafindo Persada.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. 2015. Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. 2011. Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.